PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Megantoro No. 22 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp. (0358) 321731

Nganjuk, 14 Juli 2025

Yth. Inspektorat Daerah
Kabupaten Nganjuk
di
Nganjuk

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 700/ 909 /411.305/2025

No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.	1 (Satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa

Pengirim,
KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK,

NAFHAN TOHAWI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005

Lampiran : Surat Kepala Dinas PPKB Kab. Nganjuk
Nomor : 700/ 809 /411.305/2025
Tanggal : 14 Juli 2025

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LHE SAKIP TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	WAKTU PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
1.	**PERENCANAAN KINERJA**		
a.	Melakukan penyempurnaan Rencana Aksi Tahun 2025 dengan menyajikan : - Indikator dan target kinerja untuk sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tribulan. - Pelaksana dan penanggungjawab Pelaksana dan penanggungjawab untuk masing - masing program/ kegiatan/sub kegiatan. Serta memastikan kembali rencana aksi yang dimiliki sudah mengawal penetapan kinerja program dan kegiatan yang berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) berjaian efektif dan efisien.	Dinas PPKB akan melakukan penyempurnaan Rencana Aksi Tahun 2025 dengan menyajikan : - Indikator dan target kinerja untuk sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tribulan. - Pelaksana dan penanggungjawab Pelaksana dan penanggungjawab untuk masing - masing program/ kegiatan/sub kegiatan. Serta memastikan kembali rencana aksi yang dimiliki sudah mengawal penetapan kinerja program dan kegiatan yang berfokus pada pencapaian sasaran strategi	Triwulan IV
b.	Menyelaraskan indikator sasaran pada IKU, Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dan LKjIP Tahun 2025 dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Tahun	Dinas PPKB akan menyelaraskan indikator sasaran pada IKU, Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dan LKjIP Tahun 2025 dengan Dokumen	Tribulan IV

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	WAKTU PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
	2024-2026 (sebelum adanya Perubahan Restra Tahun 2024-2026).	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026.	
c.	Menyelaraskan antara kondisi yang akan dicapai pada setiap level jabatan, yaitu: - Sasaran dan indikator kinerja untuk Pejabat Administrator/ Eselon III pada IKI dan Perjanjian Kinerja dengan Pohon Kinerja pada Dalev Renstra Tahun 2024-2026 (sebelum adanya Perubahan Restra Tahun 2024- 2026). - Sasaran dan indikator kinerja untuk Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Pejabat Fungsional pada IKI dengan Pohon Kinerja Dalev Renstra Tahun 2024- 2026 (sebelum adanya Perubahan Restra Tahun 2024-2026).	Dinas PPKB akan menyelaraskan antara kondisi yang akan dicapai pada setiap level jabatan, yaitu: - Sasaran dan indikator kinerja untuk Pejabat Administrator/Eselon III pada IKI dan Perjanjian Kinerja dengan Pohon Kinerja pada Dalev Renstra Tahun 2024-2026. - Sasaran dan indikator kinerja untuk Pejabat Pengawas/Eselon IV/ Pejabat Fungsional pada IKI dengan Pohon Kinerja Dalev Renstra Tahun 2024- 2026.	Tribulan IV
2.	**PENGUKURAN KINERJA**		
	Rapat Evaluasi Internal setiap tribulan belum menyajikan: - Pengukuran Rencana Aksi secara menyeluruh atas capaian target indikator kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. - Rekomendasi yang spesifik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.	Rapat Evaluasi Internal setiap tribulan pada Dinas PPKB akan menyajikan pengukuran Rencana Aksi secara menyeluruh atas capaian target indikator kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta rekomendasi yang spesifik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.	Tribulan IV

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	WAKTU PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
3.	**PELAPORAN KINERJA**		
a.	Dalam menyusun LKjIP Tahun 2025 supaya: Rekomendasi perbaikan kinerja pada Bab IV supaya spesifik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.	Dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025 Dinas PPKB akan menyajikan rekomendasi perbaikan kinerja pada Bab IV supaya spesifik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.	Tribulan IV
b.	Menyajikan penjelasan secara memadai tentang inovasi yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu dengan menyebarkan pamflet melalui media sosial yang berisi informasi jadwal safari pelayanan KB dan nomor telepon penyuluh KB Kecamatan yang dapat dihubungi untuk pendaftaran atau konsultasi terkait KB.	Dinas PPKB akan menyajikan penjelasan secara memadai tentang inovasi yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan menyebarkan pamflet melalui media sosial yang berisi informasi jadwal safari pelayanan KB dan nomor telepon penyuluh KB Kecamatan yang dapat dihubungi untuk pendaftaran atau konsultasi terkait KB.	Tribulan IV
4.	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**		
a.	Laporan Evaluasi Renja setiap tribulan pada tahun 2025 supaya: - Rekomendasi perbaikan kinerja spesifik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.	Laporan Evaluasi Renja setiap tribulan tahun 2025 pada Dinas PPKB akan menhyajikan rekomendasi perbaikan kinerja spesifik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi disertai	Tribulan IV

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	WAKTU PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
	- Disertai dengan Nota Dinas/ Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan rekomendasi dan bukti tindak lanjut yang memadai atas pelaksanaan rekomendasi.	dengan Nota Dinas/Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan rekomendasi dan bukti tindak lanjut yang memadai atas pelaksanaan rekomendasi.	
b.	Dalam rangka meningkatkan kualitas dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, bagi koordinator dan anggota Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum memiliki sertifikat pelatihan SAKIP supaya diikutsertakan dalam bimtek/diklat SAKIP.	Untuk selanjutnya Dinas PPKB akan mengikutsertakan koordinator dan anggota Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum memiliki sertifikat pelatihan SAKIP dalam bimtek/diklat SAKIP.	Tribulan IV

KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK,

NAFHAN TOHAWI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005